

TABIR AKUNTABILITAS “KEROAN” PADA AKUNTAN

Yunita Fitria
Muhammad Abadan Syakura

Universitas Mulawarman, Jl. Tanah Grogot No. 1, Samarinda 75117
Surel: yunita.fitria@feb.unmul.ac.id; muhammad.abadan.syakura@feb.unmul.ac.id

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7042>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 8
Nomor 1
Halaman 1-227
Malang, April 2017
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk
13 Januari 2017
Tanggal Revisi
25 April 2017
Tanggal Disetujui
30 April 2017

Abstrak: Tabir Akuntabilitas “Keroan” pada Akuntan. Penelitian ini bertujuan menelusuri akuntabilitas pada akuntan yang berdarah Kutai di Kota Samarinda. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan mengintegrasikan teori akuntabilitas “keroan” dan Ebrahim sebagai alat analisis. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang, yang berasal dari tiga organisasi yaitu rumah sakit dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penelitian menghasilkan akuntabilitas religi yang menunjukkan bahwa setiap kegiatan adalah pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di dunia. Hal ini berarti pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan adalah tanggung jawab mereka kepada Allah SWT.

Abstract: The Veil of “Keroan” Accountability in Accountant. This study aims to trace the accountability of accountants who is bloody Kutai in Samarinda City. The method used is case study by integrating the theory of “keroan” accountability and Ebrahim as an analytical tool. The informants in this study are five people who come from three organizations, namely hospitals and Non-Governmental Organizations (NGOs). This research produce religious accountability that shows that every activity is the accountability of them as the caliph in the world. It means that the work performed by an accountant is their responsibility to Allah SWT.

Keywords: akuntabilitas “keroan”, Kutai, Lembaga Swadaya Masyarakat, rumah sakit, Samarinda

Akuntabilitas merupakan kata-kata yang sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Akuntabilitas identik dengan tanggung jawab yang berbentuk laporan. Dalam hal ini Ebrahim (2003) mendefinisikan akuntabilitas sebagai aksi dari organisasi dan individunya bukan dari laporan keuangan yang telah dibuat, melainkan tanggung jawab mereka kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengelolaan yang baik dalam organisasi hingga tercapai akuntabilitas yang baik di dalam organisasi. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat diidamkan oleh semua “entitas akuntansi” baik organisasi profit maupun organisasi non-profit (Samkin & Scheineder, 2010; Bergner, Peffer, & Ramsay, 2016). Oleh karena itu, diperlukan pelaporan yang terbaik dalam setiap aksi dan kegiatan yang berkaitan dengan akuntabilitas. Banyaknya kasus

yang beragam tentang kurangnya akuntabilitas (Ahiabor & Mensah, 2013; Siraj, Ibrahim, & Sulaiman, 2007) dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut. Kota Samarinda memiliki 150 lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam hal ini diperlukan mekanisme akuntabilitas sebagai cara organisasi mengaplikasikan akuntabilitas itu sendiri di setiap proses kegiatan.

Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai aksi seseorang sebagai agen pemegang tanggung jawab kepada masyarakat (Arrington, 2007; Williams, 2015). Dalam hal ini dapat digarisbawahi bahwa akuntabilitas adalah perbuatan tanggung jawab individu dan organisasi yang akan dilaporkan atau pemanfaatannya buat masyarakat. Akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai kekuatan

dalam organisasi (Chesterman, 2008; Harris, Petrovits, & Yetman, 2015). Pengertian ini memberikan pandangan bahwa akuntabilitas adalah ujung tombak organisasi agar dapat memberikan *output* yang bermanfaat bagi organisasi secara internal ataupun eksternal, sehingga *output* yang dapat diberikan secara luas kepada masyarakat. Dalam kelancaran proses akuntabilitas diperlukan mekanisme akuntabilitas (Soobaroyen & Mahedo, 2012).

Akuntabilitas "*kerohan*" adalah akuntabilitas yang melambangkan akuntabilitas terhadap masyarakat. Suku "*Kutai*" merupakan salah satu suku terbesar di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Suku "*Kutai*" ini dikenal oleh masyarakat luas sebagai suku yang tangguh dan berdikari terhadap masalah yang mereka hadapi sejak jaman kerajaan kesultanan Kutai. Selain itu, seseorang yang berdarah atau bersuku "*Kutai*" adalah orang-orang yang suka mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan ras ataupun suku mereka sendiri. Oleh karena itu, penulis mengambil akuntan yang berdarah keturunan Kutai sebagai objek penelitian. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang menggambarkan akuntabilitas yang terdapat kulturasi di dalamnya (Jayasinghe & Soobaroyen, 2009; Randa, Triyuwono, Ludigdo, & Sukoharsono, 2011; Fitria, Ahmad-Zamri, & Zainol, 2015; Salle, 2015; Paranoan, 2015). Jayasinghe & Soobaroyen (2009) yang menganalisis akuntabilitas religi yang dijajarkan dengan nilai sosial dan budaya pada sisi agama Hindu dan Budha menandakan bahwa akuntabilitas dapat disandingkan dengan nilai sosial dan budaya. Penelitian lain yang menekankan nilai budaya adalah penelitian Randa, Triyuwono, Ludigdo, & Sukoharsono (2011) tentang studi akuntabilitas gereja yang telah terkulturisasi dengan nilai budaya masyarakat setempat yaitu menempatkan *tongkonan* sebagai lambang nilai budaya setempat.

Penelitian yang dilakukan Fitria, Ahmad-Zamri, & Zainol (2015) mengeksplorasi

akuntabilitas masjid yang dilambangkan dalam kegiatan keagamaan yang berada di Kalimantan Timur yang menghasilkan corak berbeda dari penelitian keagamaan sebelumnya. Salle (2015) juga meneliti di kawasan adat "*Ammatoa*". Penelitian ini menggambarkan betapa dekatnya kehidupan akuntabilitas terhadap kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, yang lebih menarik lagi adalah penelitian Paranoan (2015), yang meneliti konsep akuntabilitas yang terletak pada upacara adat kematian yang diselenggarakan oleh masyarakat Toraja. Dari penelitian-penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya memberikan motivasi kepada penulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplor akuntabilitas pada akuntan yang berdarah Kutai di Kota Samarinda. Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah dari sudut pandang suku dan budaya yang berbeda yaitu suku Kutai yang menggunakan akuntabilitas "*kerohan*".

METODE

Pendekatan kualitatif digunakan dalam mengungkapkan maksud akuntabilitas akuntan individu yang berdarah atau bersuku "*Kutai*" dengan menggunakan paradigma interpretif. Sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh Neuman (2014) dan Parker & Northcott (2016) interpretif adalah mencari penjelasan tentang kehidupan sosial budaya yang didasari pada pengalaman dan perspektif orang yang diteliti. Dengan demikian, nantinya penelitian ini bisa menafsirkan bentuk akuntabilitas pada setiap organisasi non-profit yang diteliti.

Informan berasal dari tiga organisasi yaitu satu rumah sakit dan 2 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Jumlah informan sebanyak 5 orang. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret 2016 sampai bulan Desember 2016. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi dan wawancara. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara spontan terhadap para informan.

Tabel 1. Daftar Nama Informan

Nama Informan	Posisi
Nyonya I	Akuntan pada LSM X
Nyonya H	Staf Akuntan pada Rumah Sakit Y
Tuan J	Akuntan pada LSM Z
Tuan S	Akuntan pada Rumah Sakit Y
Nyonya R	Staf Akuntan pada LSM X

Pemilihan informan di atas berdasarkan pertimbangan pribadi dan kedekatan hubungan. Hal ini karena jika informan merasa kenal dan dekat dengan pewawancara, jawaban yang diberikan akan lebih terbuka dan terpercaya. Informan juga diberitahu bahwa hasil wawancara akan digunakan untuk keperluan penelitian. Untuk informan yang berkerja di Rumah Sakit Y dipilih dua orang yang memang bekerja di bagian keuangan. Di bagian keuangan ada lima orang akuntan, tapi hanya dua orang yang menjadi informan dalam penelitian ini. Hal ini karena tiga orang akuntan lainnya bukan berdarah asli Kutai. Sementara itu pada LSM X ada empat orang akuntan yang mengurus bagian keuangan. Dari empat orang tersebut, hanya dua orang yang berdarah asli Kutai. Terakhir pada LSM Z ada dua orang akuntan yang mengurus keuangan dan hanya satu orang yang menjadi informan.

Setelah melakukan wawancara, penulis melakukan teknik analisis data dengan menggunakan teknik Miles, Huberman, & Saldana (2013). Penulis melakukan transkripsi hasil wawancara dan menampilkan data hasil wawancara dan setelah itu hasil wawancara direduksi dan diperoleh 6 buah koding besar hasil wawancara, yaitu laporan keuangan, penilaian kinerja, peraturan sendiri, partisipasi masyarakat, audit sosial, dan akuntabilitas religi. Setelah menemukan 6 buah subkoding, penulis menginterpretasikan hasil-hasil wawancara. Jika hasil interpretasinya tidak sesuai yang diharapkan, penulis akan memverifikasi kembali dengan mewawancarai ulang informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata "Kutai" berasal dari bahasa Hindu (Sanskerta) *quetary* yang bermakna hutan lebat atau hutan raya. Munculnya kata-kata tersebut karena tanah Kutai memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, yaitu hutan. Selain itu, Kutai memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Cina yang terdapat pada monografi Kutai tahun 1968 (Khan, 2014; Murjani, 2015). Jadi, bisa dimaknai bahwa Kutai merupakan sebuah daerah yang besar dan tangguh.

Kata Kutai tidak terlepas dari kesulitan Kutai yaitu sebuah kekuasaan yang telah mengalahkan kerajaan Hindu Tertua di Indonesia pada tahun 1605 yaitu kerajaan Mulawarman. Kesultanan Kutai bernama Kesultanan Kutai Karta Negata Ing Martadi-

pura (Martapura), yang berarti kerajaan ini berasal dari dua kerajaan yang berbeda yang disatukan di atas kerajaan Martadipura yaitu pada abad ke -17 pada masa pemerintahan Pangeran Sinum Mendapa (1635-1650).

Kerajaan Martadipura adalah kerajaan yang hidup sejak abad ke-4 dengan Kudungga sebagai raja pertamanya, yang terletak di pedalaman (hulu) aliran sungai mahakam. Terbukti adanya prastasi yupa yang ditemukan di daerah Kutai yang mengungkap Kudungga sebagai raja pertama (Darmayasa & Aneswari, 2015; Murjani, 2015). Isi prastasi yupa yang ditemukan merupakan bentuk akuntabilitas kerajaan yang pertama yang dituliskan oleh seorang pencatat kerajaan dari titah rajanya. Pencatatan yang tertuang di prastasi melambangkan cara komunikasi raja kepada masyarakatnya yang bermana pertanggungjawaban yang mereka tuangkan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Sebelum dikenal sebagai sebuah kota, Samarinda termasuk dalam wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara. Menurut perhitungan para ahli, sejarah berdirinya kota Samarinda adalah pada tanggal 21 Januari 1688 yang berdasarkan asumsi dan prediksi 64 hari masa pelayaran suku Bugis Wajo yang bermigrasi dari Wajo ke Samarinda sejak penandatanganan Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 dan kemudian bermukim di Samarinda Sebrang (Yulandhika & Nugrahanti, 2014). Namun, sebelum suku Bugis Wajo bermukim di Samarinda sebenarnya sudah ada peradaban komunitas Kutai dan Banjar di Samarinda.

Seiring dengan berjalannya waktu ada banyak permasalahan yang terjadi di kota Samarinda yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Daerah (Nooteboom, 2015). Oleh karena itu mulai banyak bermunculan organisasi nirlaba baik yang dibentuk oleh masyarakat maupun oleh pemerintah kota Samarinda sendiri. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak mengutamakan perolehan laba atau keuntungan dalam menjalankan kegiatannya. Organisasi ini bertujuan untuk memihak kepada kepentingan rakyat baik itu di bidang sosial, hukum, pendidikan, kesehatan, maupun bidang lain.

Puskesmas, rumah sakit, dan sekolah merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang didirikan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat sehingga seharusnya organisasi ini lebih mementingkan kepentingan publik. Selain itu,

ada pula organisasi nirlaba yang dibentuk oleh masyarakat yang bertujuan sama yaitu lembaga swadaya masyarakat. Organisasi ini juga didirikan untuk dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam memecahkan setiap permasalahan yang terjadi. Organisasi merupakan konsep sosiologi di dalam hubungannya dengan individu (Contrafatto & Burns, 2013; Djamhuri & Amirya, 2015). Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi pasti membutuhkan individu yaitu berbagai pihak. Oleh karena itu, lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi yang bermoral dan tidak memihak siapa pun (Andrews, 2014; Deegan & Islam, 2014). Oleh karena itu, lembaga harus memiliki komitmen yang kuat terhadap masyarakat.

Setiap organisasi tentu saja memerlukan dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sumber dana organisasi nirlaba ini berasal dari sumbangan anggota dan juga dari dana bantuan sosial dari pemerintah. Walaupun tidak diperuntukkan mencari laba, organisasi nirlaba tetap harus dikelola dengan serius. Bahkan pengelolannya harus lebih hati-hati dan transparan. Hal ini dikarenakan organisasi ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak sehingga pertanggungjawabannya tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada publik (Schwenger, Straub, & Borzillo).

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (KesBangPol) Samarinda, sampai tahun 2016 ada sekitar 150 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar resmi. Sementara sebanyak 45 LSM masih belum terdaftar atau dalam kata lain "abal-abal". Melaporkan diri ke Kesbangpol itu memang tidak diwajibkan, tetapi akan lebih baik lagi jika setiap LSM memberi tahu pemerintah terkait pendiriannya. Hal ini tidak terlepas dari kekhawatiran bahwa dana bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah jatuh ke tangan yang salah. Padahal, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 32 Tahun 2011, pasal 7, bahwa setiap lembaga nirlaba harus memiliki sekretariat yang jelas dan tetap. Sehubungan dengan penerimaan dana Bansos ini, organisasi nirlaba harus membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Dalam membuat laporan tersebut tentu saja diperlukan akuntabilitas yang baik. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut setiap organisasi nirlaba perlu beracuan pada peraturan yaitu PSAK No.45 tentang organisasi nirlaba.

Akuntabilitas "keroan" adalah akuntabilitas yang melambangkan akuntabilitas masyarakat Kutai terhadap orang banyak. Istilah keroan berasal dari bahasa Kutai yang berarti kerja sama untuk masyarakat. Dalam adat Kutai dikenal istilah "*betulungan etam rakat, Kutai jagau*" yang artinya untuk '*jagau*' atau hebat di bidang ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, dan lainnya, maka diperlukan sikap kebersamaan, saling membantu, saling memberikan nasihat, saling *betulungan* atau tolong-menolong sehingga dengan *betulungan* yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Kerja sama atau tolong menolong yang dimaksud di sini adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan peranan organisasi nirlaba sebagai lembaga yang mengutamakan kepentingan publik, maka istilah "keroan" akan menjadi sangat pas. Pola pikir "keroan" yang tertanam dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Kutai menimbulkan suatu harmonisasi yang baik antarindividu. Pola pikir ini tidak terlepas pula dari para akuntan berdarah Kutai yang selalu memegang teguh prinsipnya.

Masyarakat Kutai sangat dekat dengan istilah kemasyarakatan, yaitu semua orang harus mementingkan kepentingan masyarakat. Salah satu budaya yang penulis observasi adalah timbulnya budaya akuntabilitas "keroan" yang muncul di masyarakat Kutai. Berikut hasil wawancara penulis dgn Mrs. A (warga Kutai yang memang mempunyai darah keturunan kesultanan Kutai):

"Etam ini mesti besama-sama amun nak bangun wadiah etam ini (kita ini harus bersama-sama kalau mau membangun tempat kita ini). Endi kawa sorang sorang (tidak bisa sendiri-sendiri). Semua harus diarahkan untuk keroan etam (masyarakat kita) di tanah Kutai ini. Etam niy tuha sudah (kami ini tua). Peninggalan etam niy ya tanah sisa niy dijaga (warisan kami ya daerah kalimantan ini yang dijaga)"

Berdasarkan pernyataan salah seorang penduduk asli di atas, dapat disimpulkan bahwa kata "keroan" merupakan kekuatan atau nafas dari masyarakat Kutai. Kata "keroan" akan ditinjau dari akuntabilitas masyarakat Kutai pada saat sekarang yang sudah memiliki multidimensi kehidupan

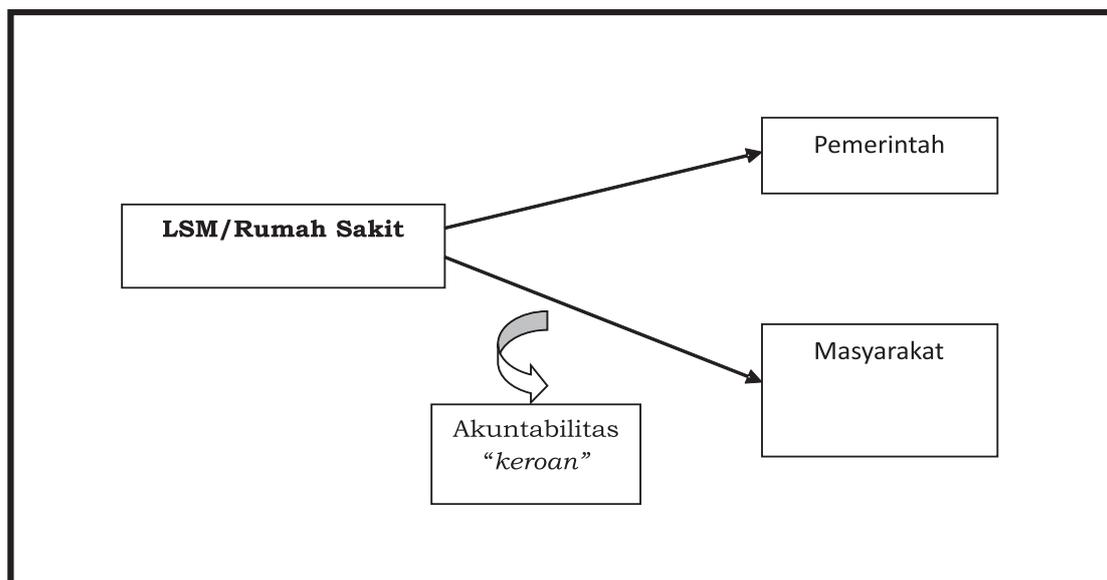
dan dipengaruhi oleh teknologi yang tinggi, sehingga akan berbeda melihat akuntabilitas yang akan digambarkan dengan nilai budaya “keroan”. Budaya “keroan” ini dimaksudkan untuk saling tolong dalam konsep akuntabilitas pada masyarakat. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi-organisasi yang berada di kota Samarinda, yang memiliki akuntan-akuntan yang bersuku Kutai.

Penelitian ini menggunakan tiga objek yaitu satu rumah sakit dan dua lembaga swadaya masyarakat. Rumah Sakit Y adalah rumah sakit milik pemerintah yang banyak melayani masyarakat luas. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, rumah sakit Y harus memiliki akuntabilitas yang tinggi. Objek yang kedua adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) X adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kesejahteraan. Lembaga Swadaya Masyarakat ini memberikan bantuan berupa zakat, infaq, sadaqah, dan waqaf kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga diperlukan akuntabilitas yang tinggi dalam melayani masyarakat dan diperlukan mekanisme yang baik dalam pengaplikasiannya. Objek yang ketiga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Z yang peduli pada lingkungan kota Samarinda. Maksudnya adalah lembaga ini memberikan bantuan kepada masyarakat Samarinda pada saat terjadi bencana di kota Samarinda seperti banjir dan kebakaran. Dalam pengaplikasiannya LSM ini memerlukan mekanisme akuntabilitas yang tepat dalam melakukan

penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat agar masyarakat percaya kepada akuntabilitas LSM ini.

Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal yang paling esensi dari sebuah organisasi. Pentingnya laporan keuangan dalam sebuah organisasi dikarenakan sebagai bahasa akuntabilitas bagi masyarakat sebagai bagian dari organisasi. Jadi, dapat disimpulkan laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban organisasi terhadap masyarakat. Masyarakat yang tidak bisa ikut serta dalam kegiatan organisasi hanya bisa melihat akuntabilitas organisasi melalui stabilitas kegiatan organisasi, sehingga masyarakat percaya bahwa organisasi tersebut konstan dalam melaksanakan program-programnya. Dalam hal ini semua kegiatan yang dituangkan dalam organisasi merupakan bagian dari laporan keuangan. Berikut penulis tampilkan beberapa hasil wawancara yang berasal dari beberapa informan yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi.

Lembaga swadaya masyarakat X yang bergerak dalam bidang keagamaan adalah organisasi yang bergerak dalam menyalurkan infaq, zakat, dan sadaqah kepada masyarakat yang kurang mampu. Organisasi ini memiliki seorang akuntan yang bersuku Kutai yang mengelola laporan keuangan. Dalam hal ini individu yang mengelola sangat memerlukan pemahaman tentang laporan keuangan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Nyonya I:



Gambar 1. Konsep Akuntabilitas Organisasi

"Saya *ndik* (tidak) begitu paham tentang laporan keuangan. Bila saya paham dengan persoalan *pitis* (uang) ini laporan yang saya *polah* (buat) ini pasti baik bentuknya. Walaupun saya seorang lulusan akuntansi. Untung ada teman kami disini yang bantu saya jadi *ndik* bingung membuatnya. Nanti laporan yang *etam* buat ini juga akan buat *keroan etam* (masyarakat kita)"

Pernyataan Nyonya I di atas menggambarkan bahwa Nyonya I sangat memerlukan pemahaman tentang laporan keuangan. Pengetahuan laporan keuangan yang dibuat oleh Nyonya I masih terlihat sangat sederhana. Hanya berupa laporan keuangan yang mencantumkan pengeluaran dan pemasukan. Seharusnya yang diperlukan Nyonya I adalah laporan keuangan yang memperlihatkan berapa besarnya zakat, infak, dan sadaqah dari masyarakat. Laporan keuangan adalah alat yang sering digunakan dalam penyampaian akuntabilitas (Ebrahim, 2003; Roussy, 2015). Hasil penemuan yang lain berdasarkan wawancara dengan Nyonya I menemukan bahwa kemampuan Nyonya I dalam membuat jurnal juga masih minim. Berikut pernyataan Nyonya I:

"Saya masih kurang memahami *molah* jurnal yang betul. Kalau yang biasa saja *etam ni* paham aja. Tapi kalau ada perlakuan yang khusus saya masih *ndik* paham *molahnya* (Saya masih kurang memahami membuat jurnal yang betul. Kalau yang biasa saja paham saja. Tapi kalau ada perlakuan khusus saya masih tidak paham membuatnya)".

Nyonya I merupakan salah satu akuntan yang memerlukan bimbingan yang mendalam tentang laporan keuangan. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka akan menghambat proses akuntabilitas organisasi. Rudiantoro & Siregar (2012) menyatakan kemampuan dalam membuat laporan keuangan diperlukan akuntan yang bisa memahami standar pembuatan laporan keuangan, sehingga dapat menampilkan *output* yang bermanfaat dalam pelaporan keuangan kepada publik yaitu masyarakat luas. Hal lain yang menarik dari LSM X adalah sering menampilkan akuntabilitas melalui bule-

tin ataupun majalah yang dikeluarkan oleh LSM X. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Nyonya R:

"*Etam* ini ada punya buletin dan majalah yang *etam* sampaikan kepada donatur. Lebih lengkap di sana *etam* tampilkan. Lampiran dalam majalah biasa *etam* tampilkan jumlah *pitis* yang *etam* terima. Bisa jua *etam* tampilkan nama-nama donatur yang memberikan *pitis*. Jadi *ndik* sampai buat donatur bingung dengan tampilan yang ada di majalah ataupun buletin *etam* (Kami ini ada mempunyai buletin dan majalah yang kami sampaikan kepada donatur. Lampiran dalam majalah biasa kami tampilkan jumlah uang yang kami terima. Bisa *jua* kami tampilkan nama-nama donatur. Jadi, tidak membuat donatur bingung dengan tampilan yang ada di majalah ataupun buletin kami)"

Pernyataan Nyonya R membuktikan adanya akuntabilitas yang dilakukan oleh LSM X melalui media yaitu majalah dan buletin. Hal ini dapat membuat masyarakat sebagai donatur percaya kepada LSM tersebut. Efek kepercayaan ini merupakan bentuk pragmatis yang ditimbulkan oleh majalah ataupun buletin. Biasanya mereka menampilkan angka jumlah rupiah yang diterima beserta nama-nama donatur yang memberi. Hal tersebut merupakan suatu simbol akuntabilitas dari organisasi tersebut. Jadi, lembaga swadaya masyarakat seharusnya menampilkan simbol akuntabilitas tersebut untuk mendapatkan efek kepercayaan dari masyarakat.

Berbeda dengan LSM Z yang memiliki satu orang akuntan yang mahir dalam membuat laporan keuangan tetapi tidak didukung dengan teknologi dalam organisasi karena keterbatasan anggaran pada organisasi tersebut. Hal ini digambarkan oleh Tuan J:

"Saya bisa aja *molah* laporan keuangan dan *molah* jurnal kayak di perusahaan besar. Karena saya ini dulu bekerja di perusahaan swasta yang dilengkapi dengan bermacam-macam teknologi. Tapi *amun* sekarang ini *kan ndik* ada aplikasi akuntansi hanya manual

aja saya ini bekerja di kantor ni. Anggaran *etam* pun terbatas jadi *ndik* bisa beli. (Saya bisa saja buat laporan keuangan dan buat jurnal seperti di perusahaan besar. Karena saya ini dulu bekerja di perusahaan swasta yang dilengkapi bermacam-macam teknologi. Tetapi sekarang ini tidak ada aplikasi akuntansi hanya manual saja saya ini bekerja di kantor. Anggaran kami pun terbatas jadi tidak bisa beli)”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa informan menganggap teknologi merupakan salah satu unsur yang penting dalam menunjang pentingnya proses akuntabilitas. Akan tetapi, akuntabilitas merupakan sesuatu yang dikerjakan dengan hati yang ikhlas dan tidak memihak, karena pada dasarnya yang dikerjakan semaksimal untuk masyarakat luas. Apalagi jika dihubungkan dengan teknologi yang merupakan buatan manusia yang tidak bisa bertahan sepanjang masa. Jika demikian bisa terdapat unsur penjajahan di balik makna akuntabilitas di dalamnya.

Hasil ini juga sejalan dengan pemikiran Efferin (2015) dan Brown, Dillard, & Hopper (2015) yang menyebutkan bahwa teknologi merupakan senjata yang mengarah kepada ketamakan. Ketamakan merupakan kehancuran yang berasal dari individu itu sendiri, sedangkan kehancuran bisa saja terjadi yaitu kehancuran sistem organisasi atau bahkan akhirnya merusak proses akuntabilitas. Jadi, hubungan individu dan akuntabilitas bisa jadi akan menyebabkan kehancuran dari dua sisi yaitu kehancuran sistem organisasi dan individu yang ada di dalam organisasi.

Rumah sakit Y merupakan salah satu rumah sakit yang terbesar di Samarinda. Berdasarkan wawancara dengan salah satu akuntannya yaitu Nyonya H bahwa laporan keuangan yang dibuat merupakan laporan yang sudah mengikuti peraturan pemerintah. Karena sudah ada aturan yang tertata dari organisasi tersebut, proses akuntabilitas menjadi lancar.

“Laporan keuangan ni dah *dipolah* (dibuat) sesuai dengan himbauan pemerintah *etam* (pemerintah kami). Tapi *ndik jua* saya *molah sorangan* (Tapi tidak juga saya buat sendiri). Ada juga kawan

etam yang bantu *polahkan* demi *keroan etam* (ada juga teman saya yang bantu buatkan demi masyarakat kita)”

Pernyataan di atas menandakan bahwa Nyonya H mematuhi atau mengikuti aturan yang ada di dalam peraturan pemerintah. Laporan keuangan yang mereka buat sudah mengarah PSAK 45 yaitu sudah mematuhi standar akuntansi untuk sektor publik. Rumah sakit ini perlu menggunakan aturan ini karena merupakan rumah sakit yang sudah mengarah ke badan layanan umum (BLU). Pelayanan dan ketersediaan obat merupakan hal yang esensi dari rumah sakit yang sudah berbadan layanan umum. Berikut Nyonya H menambahkan:

“Dalam institusi *etam* ni yang paling penting adalah pelayanan terhadap publik. Dan persediaan obat-obatan pun harus benar-benar lengkap tersedia. Jangan sampai pasien *etam* mengeluh *ndik* ada obat dan pelayanan *ndik* baik. Karena berhubungan dengan bagian anggaran keuangan. Jadi, harus disiapkan *beneh*. (Dalam institusi kami ini yang paling penting adalah pelayanan terhadap publik. Dan persediaan obat-obatan pun harus benar-benar lengkap tersedia. Jangan sampai pasien kami mengeluh tidak ada obat dan pelayanan tidak baik. Karena berhubungan dengan anggaran keuangan. Jadi harus disiapkan betul.)”

Berdasarkan pernyataan Nyonya H di atas persiapan anggaran keuangan harus dipersiapkan dengan baik karena berhubungan dengan pelayanan. Rumah Sakit Y merupakan badan layanan umum sehingga memperhatikan pelayanan yang baik khususnya persediaan obat-obatan. Jika masyarakat merasa puas maka akan terbukti akuntabilitas di dalam organisasi tersebut berjalan dengan baik atau dengan kata lain bahwa Rumah sakit Y telah melaksanakan prosedur akuntabilitas dengan baik. Oleh karena itu, dalam pelaporan keuangannya pun telah melaksanakan akuntabilitas secara maksimal pula. Hasmath & Hsu (2008) berpendapat bahwa sistem akuntansi yang baik akan menimbulkan akuntabilitas yang baik juga. Jika sebuah organisasi mementingkan

masyarakat atau dalam masyarakat Kutai dinamakan "keroan", maka akuntabilitas "keroan" akan membantu organisasi sebagai tanggung jawabnya dalam menjalankan program-program organisasinya.

Komunikasi yang terbuka dalam penilaian kinerja organisasi. Komunikasi merupakan hal yang penting di dalam organisasi. Tanpa adanya komunikasi maka tidak akan tercapai proses akuntabilitas organisasi secara maksimal. Dalam hal ini komunikasi yang paling tampak terjadi di organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) Z. Terlihat dari pendapat Akuntan Tuan J:

"Hal yang paling utama dalam organisasi adalah komunikasi yang membuat *etam ni* merasa nyaman sehingga *etam ni* nyaman jua (juga) bekerja. Jadi pimpinan *etam ni bekesah* dengan *etam* (Jadi pimpinan kita ini bercerita dengan kita), *etam ni* senang aja (kita ini senang aja)"

Pendapat di atas, menekankan bahwa pimpinan juga dapat membantu proses akuntabilitas walaupun secara informal. Proses informal ini juga dapat membantu karyawan menyampaikan saran atau keluhan yang didapatnya dalam menjalankan pekerjaan. Dengan begitu karyawan akan sangat termotivasi dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Dalam hal ini pendapat Tuan J diatas sejalan dengan pendapat Cracks (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas informal terdiri dari kenyamanan dan interaksi yang terbuka. Ini menandakan bahwa staf memerlukan komunikasi yang nyaman dengan pimpinannya. Perasaan yang nyaman dengan lingkungan organisasinya dapat membantu proses mekanisme akuntabilitas berjalan dengan baik. Begitu pula yang terjadi pada rumah sakit Y, salah satu staf akuntannya yaitu, nyonya H:

"Pimpinan *etam* kadang ada aja jengok ke ruangan *etam ni* untuk *becarangan* tentang apa kesulitan *etam* ini dalam menjalankan program organisasi. *Endik* susah *jua* mengesahkan keluh kesah *etam* (Pimpinan kita ini kadang ada saja datang ke ruangan kami ini untuk berbincang-bincang tentang apa kesulitan kamu ini dalam menjalankan program organisasi)".

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik simpulan bahwa pimpinan Nyonya H sering melakukan komunikasi untuk memperlancar pekerjaan di dalam organisasi. Proses akuntabilitas informal ini digunakan untuk mencapai program yang diinginkan oleh organisasi. Semua keluhan dan hambatan yang dialami oleh Nyonya H disampaikan kepada pimpinannya secara terbuka. Hal ini membuktikan komunikasi secara terbuka dapat memberikan kenyamanan kepada sesama individu dalam entitas. Hal senada disampaikan oleh Nyonya R akuntan LSM X :

"Jika pimpinan *etam* ini sering ngobrol dengan *etam ni* perasaan *etam* tuh kayak diperhatikan oleh pimpinan *etam*. Senang *beneh* perasaan *etam* ini. Betanya kabar saja *etam* ini pun merasa bahagia *beneh*. Komunikasi tentang masalah *etam* ini jadi nyaman (Jika pimpinan kami ini sering ngobrol dengan kami ini perasaan kami jadi seperti diperhatikan oleh pimpinan kami. Senang betul perasaan kami ini. Bertanya kabar saja kami ini pun merasa bahagia betul. Komunikasi tentang masalah kami ini jadi nyaman)"

Hal yang sama yang disampaikan oleh Nyonya R disimpulkan dapat menekankan bahwa komunikasi sebagai media informal berperan penting dalam proses akuntabilitas. Pada akhirnya proses komunikasi ini akan mengarah pada akuntabilitas "keroan" yang mengarah kepada masyarakat karena proses komunikasi yang terbuka dapat menelaah program-program yang bermasalah dalam organisasi. Budaya akuntabilitas "keroan" yang terlihat dalam organisasi ini melambangkan kulturasi yang tercipta dari pencampuran aktivitas individu yang satu dengan yang lainnya. Yaitu melalui komunikasi verbal yang dapat mempererat mekanisme akuntabilitas di dalam organisasi (Fitria, Ahmad-Zamri, & Zainol, 2015). Komunikasi verbal yang harmonis ini dapat mengaktifkan sensor motorik untuk melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan mekanisme akuntabilitas. Komunikasi verbal yang dituangkan dalam ucapan doa dapat terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Jayasinghe dan Soobaroyen (2009), yang menggambarkan pujian-pujian doa yang mereka haturkan adalah komuni-

kasi mereka terhadap Tuhan. Jadi, dapat disimpulkan komunikasi yang terbuka sangat penting dalam melihat kinerja para pegawai yang berada dalam organisasi.

Timbulnya peraturan sendiri di organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam mekanisme akuntabilitas yang terlibat dalam penelitian ini adalah adanya peraturan tersendiri dari staf-staf yang menjalankan akuntabilitas. Hal ini memengaruhi cara membuat laporan keuangan. Hal ini tergambar dalam pernyataan akuntan pada LSM X, yaitu nyonya R:

“Kami *endik* (tidak) ada menggunakan peraturan keuangan. Apa namanya ya itu? Iya PSAK 45 yang kita *polah* (buat) laporan keuangan. Jadi, kami hanya *molah* (buat) kolom pemasukan dan pengeluaran berdasarkan apa yang sudah ada aturan di wadah *etam* (tempat kami) ini. Tapi, guna *molah maju* lembaga kami (tapi berguna membuat maju lembaga kami). Kami siap mengubah laporan keuangan kami.”

Pernyataan di atas mengemukakan adanya aturan tersendiri yang dibuat oleh seorang akuntan tanpa melihat adanya aturan yang seharusnya. Kata “peraturan sendiri” mengarah kepada usaha LSM dan jaringannya dalam mengembangkan standar atau kode dari tingkah laku dan kinerja (Ebrahim, 2003). Timbulnya peraturan sendiri juga dikarenakan kemudahan organisasi dalam membaca laporan keuangan, sehingga memudahkan proses mekanisme akuntabilitas di LSM.

Pada tahun 2001 pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 16 tahun 2001 yang kemudian diamandemen dengan UU 28/2004. Di dalam undang-undang itu telah diatur berbagai hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yayasan sebagai organisasi masyarakat, proses pendirian, pengesahan, dan pembuatan laporan keuangan pertanggungjawaban. LSM merupakan organisasi yang tidak memiliki anggota (*non-membership organization*) untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak diarahkan untuk mencapai keuntungan ekonomis. Berikut disampaikan oleh Tuan J pada LSM Z:

“Kadang *etam* ni bingung mesti pakai aturan yang mana bila ada

masalah di LSM *etam* ni. *Etam* ndik pernah mau cari untung. Yang penting *etam* bekerja untuk *kerohan etam*. Karena *etam* harus paham bahwa *etam* ni organisasi yang bemoral (Kadang kami ini bingung harus pakai aturan yang mana bila ada masalah di LSM kami ini. Kami tidak pernah mau mencari untung. Yang penting kami ini bekerja untuk masyarakat kami. Karena kami paham bahwa kami ini organisasi yang bermoral)”

Berdasarkan pernyataan Tuan J terlihat bahwa LSM adalah organisasi publik yang bermoral dan harus mementingkan masyarakat. Sebagai organisasi publik, LSM memperoleh legitimasinya dari tiga sumber yaitu hukum, moral, dan sosial (Darmada, Atmadja, & Sinarwati, 2016). Hukum dan regulasi ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara. Legitimasi legal-formal merupakan pengakuan dari negara akan keberadaan LSM dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Legitimasi moral ada karena LSM didirikan untuk kebaikan bersama (*common goods*) atau kepentingan publik (*public benefit*). Sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan orang lain, landasan legitimasi moral justeru menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus terlihat dalam nilai-nilai yang dianut serta tindak-tanduk LSM (Niswatin & Mahdalena, 2016). Legitimasi moral berhubungan dengan kesesuaian antara apa yang dilakukan LSM dengan nilai-nilai moral seperti kebebasan, keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan kebersamaan (O'Dwyer & Boomsma, 2015).

Legitimasi sosial adalah berupa pengakuan dari masyarakat kepada LSM karena dianggap bermanfaat bagi mereka. Ebrahim (2003), Conway, O'Keefe, & Hraskey (2015), dan Khan & Rahman (2016) berargumentasi bahwa terdapat indikator yang dapat dijadikan ukuran apakah sesuatu LSM mempunyai legitimasi sosial yang kuat. Pertama, adanya pengakuan dari masyarakat (Ebrahim, 2003). Kedua, ada pembenaran, yaitu bahwa kegiatan-kegiatan LSM tersebut mendapat sambutan dari masyarakat yang memberikan dukungan moral bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilihat sebagai sesuatu yang “baik” atau “bermanfaat” (Con-

way, O'Keefe, & Hrasky, 2015). Ketiga, berupa dukungan, di mana LSM memperoleh bantuan berupa dana, tenaga, informasi, dan sebagainya dari masyarakat maupun pihak lain (Khan & Rahman, 2016).

Akuntabilitas sesungguhnya berkaitan erat dengan legitimasi atau keabsahan dan keberadaan LSM sebagai organisasi masyarakat sipil (*civil society*). Adanya legitimasi yang menjadi status atau "nama baik" LSM merasa mendapatkan kehormatan atau kepercayaan untuk melakukan kerja atau peran berdasarkan pengakuan/persetujuan masyarakat (Conway, O'Keefe, & Hrasky, 2015). Baik pemerintah maupun pihak lain di luar negara terutama tentunya kalangan publik. Legitimasi berhubungan dengan persepsi publik yang valid (berdasarkan fakta yang sebenarnya) bahwa LSM benar-benar melakukan apa yang dikatakannya dan dapat membuktikan hasil kerjanya secara terbuka dan transparan (Williams & Adams, 2013).

Pemahaman seseorang tentang akuntabilitas seringkali ditafsirkan dengan sangat sempit sebagai akuntabilitas keuangan semata yaitu sebatas suatu sistem pembukuan dan pelaporan keuangan. Konsep akuntabilitas sesungguhnya jauh lebih luas, yaitu suatu proses di mana LSM menganggap dirinya bertanggung gugat secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa yang akan dilakukan, dan apa yang tidak akan dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada publik yang akan dilayani (Feng, 2014; Lauwo, Otusanya, & Bakre, 2016; O'Brien & Tooley, 2013). Secara mekanisme atau prosedur operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi/ pelaporan (*informing/reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*) (Ebrahim, 2003).

Tidak semua regulasi harus disusun atau ditentukan oleh pemerintah karena peran pemerintah dapat menjadi sangat eksekutif. Oleh karena itu, organisasi kemasyarakatan perlu diberikan ruang untuk mengatur dirinya melalui mekanisme pengaturan diri sendiri (*self-regulation mechanism*). Dengan adanya "*self-regulation*" ini, diharapkan LSM dapat mengatur peraturan sesuai kebutuhan dan sebagai upaya komunitas LSM untuk bersama-sama merumuskan dan memberlakukan aturan yang berisikan norma-norma yang dapat dipatuhi bersama. Namun, di sini pemerintah dan komunitas LSM dapat membuat suatu kode

etik yang harus dipatuhi bersama. Adanya kode etik akan menunjukkan bahwa kalangan LSM cukup sensitif terhadap kemungkinan pelanggaran norma atau nilai-nilai yang mereka anut.

Jadi, dari pemahaman tersebut dihubungkan dengan jawaban narasumber terkait bagaimana bentuk pelaporan keuangan yang selama ini mereka olah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya tidak ada peraturan yang "baku" bagi para LSM terutama yayasan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga sosial. Pemahaman tentang akuntabilitas yang mereka pahami dan yakini sampai saat ini adalah sesuatu yang mereka anggap benar dan tidak menyalahi aturan. Prinsip ini dapat dikatakan sebagai suatu akuntabilitas yang fleksibel dan bebas, tetapi tetap relevan dan transparan.

Hal ini berbeda dengan Rumah sakit Y yang sudah memiliki aturan, khususnya peraturan yang berasal dari pemerintah. Misalkan dalam penyusunan laporan keuangan, Rumah sakit Y menggunakan PSAK 45 karena merupakan organisasi yang berbentuk badan layanan umum. Berikut pernyataan Nyonya H:

"*Etam* disini dah memakai aturan PSAK 45 untuk laporan keuangan. Amun peraturan sendiri ndik ada. Inikan lembaga pemerintahan jadi *etam* hanya mengikuti aturan yang berasal dari pemerintah saja (Kami disini sudah memakai aturan PSAK 45 untuk mengelola laporan keuangan. Tidak ada peraturan sendiri. Ini kan lembaga pemerintahan jadi kami hanya menggunakan peraturan dari pemerintah saja)"

Nyonya H menekankan bahwa Rumah Sakit Y merupakan lembaga pemerintah. Jadi rumah sakit Y mengikuti aturan keuangan yang sudah terstruktur dari pemerintah. Lembaga pemerintahan yang besar seperti rumah sakit biasanya lebih terikat oleh birokrasi kepemimpinan begitupun soal peraturan, sehingga tidak ada aturan yang mereka ciptakan sendiri dalam menjalankan proses akuntabilitas.

Partisipasi merupakan nilai yang berharga bagi organisasi. Partisipasi sangat diharapkan dalam segala tindakan akuntabilitas. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi sangat berharga bagi organisasi lembaga swadaya masyarakat X. Berikut

pendapat salah satu akuntan yang berada di LSM X tersebut Nyonya R:

“Saya sangat berharap beneh kawan-kawan *etam* ini dan masyarakat *etam ni* dapat partisipasi sama-sama dalam memajukan organisasi *etam ni*...(Saya sangat berharap betul teman-teman saya ini dan masyarakat kami ini dapat partisipasi bersama-sama dalam memajukan organisasi kami ini)”

Berdasarkan pendapat Nyonya R bahwa partisipasi sangat penting dalam organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ebrahim (2003) dan Petrovits, Shakespeare, & Shih (2011) bahwa partisipasi adalah sesuatu yang harus tetap ada dan konstan di dalam organisasi.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas keroan diharapkan sebagai akuntabilitas terhadap masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Fitria, Ahmad-Zamri, & Zainol, (2015) dan Nyamori (2009) juga menyatakan bahwa partisipasi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat di sini maksudnya adalah partisipasi masyarakat juga membantu kegiatan yang ada di dalam organisasi. Berikut yang diungkapkan oleh Nyonya R:

“Bila ada kegiatan sosial di sini, masyarakat ramai-ramai datang bantu masukkan barang dalam kresek. Ada *jua* yang polahkan minum dan makanan untuk *etam* (Ada juga yang membuatkan minum dan makanan untuk kami). *Amun* ada kegiatan yang *endik* bagus mereka kasih kami saran (Tapi jika ada kegiatan yang tidak bagus mereka memberikan saran)”

Maksud dari pernyataan di atas adalah partisipasi dari masyarakat merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas. Ebrahim (2003) dan Davison & Warren (2009) mengategorikan saran dan kontrol dari masyarakat adalah bentuk dari partisipasi. Jadi, kegiatan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat dapat menjadi mekanisme akuntabilitas.

Dalam kasus di atas dapat dikatakan bahwa pengurus dan LSM yang bersangkutan telah mendapatkan legitimasi sosial dan legitimasi moral di mata masyarakat. Legiti-

masi sosial adalah pengakuan dari masyarakat kepada LSM karena LSM tersebut dianggap memberikan keuntungan atau manfaat yang membantu mereka. Sementara itu, legitimasi moral adalah suatu kenyataan atau pemahaman bahwa LSM itu didirikan untuk kebaikan bersama (*common goods*) atau kepentingan publik (*public benefit*) atau bisa dikatakan dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya adanya pengakuan dari masyarakat, adanya pembenaran dari masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan LSM itu baik dan bermanfaat, serta adanya bantuan dana tenaga, informasi dan lainnya dari masyarakat yang diberikan secara cuma-cuma oleh masyarakat kepada LSM dapat menjadi indikator bahwa LSM tersebut telah mendapatkan legitimasi sosialnya di mata masyarakat (Nunnenkamp, Ohler, & Schwörer, 2013). Sementara itu, legitimasi moral memiliki tiga prinsip utama, yaitu, filantropi, altruisme, dan voluntarisme (Fitria, Ahmad-Zamri, & Zainol, 2015). Adanya kesesuaian antara apa yang dilakukan oleh LSM dan nilai-nilai moral seperti kebebasan, keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan kebersamaan yang menyebabkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh LSM.

Pihak LSM sendiri merasa yakin dan percaya bahwa masyarakat akan membantu mereka dalam menjalankan setiap kegiatan yang dilakukannya. Adanya prinsip “keroan” dalam diri masyarakat menimbulkan suatu ikatan kekeluargaan yang erat antara LSM dan masyarakat. Hubungan yang harmonis ini merupakan suatu pembuktian bahwa akuntabilitas LSM diakui oleh masyarakat.

Kurangnya audit sosial dalam organisasi. Rumah sakit Y merupakan sebuah rumah sakit yang cukup besar di kota Samarinda. Penelitian ini menemukan bahwa audit sosial yang kurang terhadap organisasi sektor publik yaitu (Y). Audit sosial ini sangat membantu juga dalam peningkatan organisasi terutama akuntabilitas. Berikut pendapat seorang akuntan dari Tuan S:

“Tempat *etam ni* kurang penyampaian langsung dari masyarakat mengenai keuangan..tapi behamburan aja kotak saran tempat *etam ni* tapi *ndik* ada juga kemajuan (Tempat kami ini kurang penyampaian langsung dari ma-

syarakat mengenai keuangan, walaupun banyak kotak saran di tempat kami ini tapi tidak ada juga kemajuan)"

Dalam hal ini Tuan S menjelaskan walaupun ada alat sebagai penyampaian saran kepada organisasi, tapi kurang memotivasi kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penyampaian komunikasi secara langsung dari masyarakat kepada organisasi. Jha & Chen (2013) dan Goretzki, Strauss, & Weber (2013) menekankan bahwa audit sosial berasal dari internal, eksternal, dan masyarakat luas dalam menyampaikan laporan keuangan, sehingga sangat memerlukan audit sosial yang melambangkan tanggung jawab kepada masyarakat.

Selain Rumah Sakit Y, LSM X memiliki audit sosial dari masyarakat. LSM Z tidak memiliki audit dari eksternal tetapi hanya memiliki audit dari internal saja. Bentuk audit internal yang dirasakan dalam LSM Z adalah berupa komunikasi yang berasal dari pimpinan LSM. Berikut pernyataan dari Tuan J:

"*Etam* ini endik ada pemeriksaan seperti audit dari luar maupun dari dalam, paling cuma teguran atau saran dari pimpinan dan masyarakat aja yang masuk. Yang *bujuri* punya *etam* ini. (Kami ini tidak ada pemeriksaan seperti audit dari luar maupun dari dalam, paling cuma berupa teguran atau saran dari pimpinan dan masyarakat aja yang masuk. Yang memperbaiki punya kita ini)"

Pernyataan Tuan J di atas menerangkan bahwa LSM Z tidak memiliki audit sosial secara menyeluruh. Audit yang timbul hanya berupa saran dari masyarakat. Seharusnya audit sosial ini merupakan tipe audit yang terbaik untuk LSM, karena peran audit sosial dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi melalui pendapat eksternal, internal, dan masyarakat luas (Aziz, 2015; Fitria, Ahmad-Zamri, & Zainol, 2015), sehingga prosedur akuntabilitas yang baik bisa dirasakan menyeluruh oleh semua pihak.

LSM X juga memiliki audit sosial yaitu audit dari pihak internal, eksternal maupun masyarakat luas. LSM X memiliki audit internal yaitu hanya berupa audit yang berasal dari pimpinan dan manajer yang ada di LSM tersebut. Audit eksternal LSM ini memang-

gil auditor independen untuk memeriksa akuntabilitas yang ada di dalam organisasi. Berikut pernyataan Nyonya R:

"*Etam* pernah dapat pemeriksaan dari internal tapi hanya berupa kritikan dari dalam saja. Untuk audit eksternal mungkin yang lebih independen. Audit dari masyarakat umum biasa *etam* dapat dari donatur biasanya yang menyumbang ke LSM ini. Biasa *sida* cuma memberi saran, contohnya "Kenapa *pitis etam ndik* diberikan ke panti asuhan ini atau ke rumah jompo (Kami pernah dapat pemeriksaan dari internal tapi hanya berupa kritikan dari dalam saja. Untuk audit eksternal mungkin lebih independen. Audit dari masyarakat umum biasa kami dapat dari donatur biasanya yang menyumbang ke LSM ini. Biasa mereka cuma membeberikan saran, contohnya "kenapa uang kamu tidak diberikan ke panti asuha ataupun ke rumah jompo)"

Berdasarkan pernyataan Nyonya R di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa LSM X mendapatkan audit sosial secara keseluruhan. Namun, sebenarnya cukup banyak kritik mengenai kelemahan LSM (Kaya, Kirsch, & Henselmann, 2016; Gaver & Im, 2014). Kelemahan ini bisa saja terjadi karena administrasi yang kurang memadai, masih adanya peran pemimpin yang menonjol ataupun tidak ada pembagian tugas yang jelas, dan pembuatan proposal yang tidak jelas (Scott & Orlikowski, 2012; Hermanson, Smith, & Stephens, 2012). Perilaku buruk para oknum LSM ini memang membuat LSM yang "jujur" menjadi terpojok. Padahal, tidak semua LSM berlaku demikian.

Hal inilah yang tadinya menjadi dasar bagi para LSM untuk membuat suatu wadah bagi masyarakat untuk memberikan *feedback* baik itu kritik maupun masukan. Namun, ternyata beberapa usaha LSM ini tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari masyarakat, entah karena masyarakat tidak tahu mau menanggapi apa, atau mereka telah merasa puas dengan pekerjaan LSM tersebut.

Timbulnya akuntabilitas religi terhadap Tuhan yang Maha Esa atas apa yang dikerjakan oleh akuntan. Pemahaman akuntan tentang akuntabilitas yang mereka

lakukan pada akhirnya menuju pemahaman akuntabilitas terhadap Tuhan (Kusdewanti, 2015; Sitorus, 2016). Karena pemahaman mereka adalah apa yang mereka kerjakan untuk masyarakat adalah mereka lakukan sebagai tanggung jawab mereka terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berikut adalah pernyataan Nyonya I:

“Jadi bila kita paham dengan laporan keuangan ini, kita kesahkan laporan kita ini dengan masyarakat paham, maka lega jua leh tanggung jawab *etam* dengan Tuhan (Jadi bila kita paham dengan laporan keuangan ini, kita ceritakan laporan kita ini dengan masyarakat mengerti, maka lega juga tanggung jawab kami)”

Berdasarkan pendapat Nyonya I di atas juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dari dalam dirinya adalah akuntabilitasnya juga kepada Tuhan. Fitria, Ahmad-Zamri, & Zainol (2015) juga menyatakan kemampuan seseorang dalam menyampaikan laporan keuangan kepada juga dapat meningkatkan akuntabilitasnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bisa membawa langsung informan ke dalam bentuk semantik hubungan yang mendalam dengan Tuhan yang Maha Esa yang berdampak baik ke masyarakat (Musmini & Sirajudin, 2016). Individu yang percaya akan akuntabilitasnya kepada Tuhan akan menjalankan komitmennya. Salah satu bentuk komitmen yang diutarakan oleh Nyonya I di atas adalah bentuk komitmennya kepada Tuhan yang dituangkan dalam pekerjaannya sebagai akuntan.

Selain itu, ada salah satu akuntan yang berpendapat bahwa apa pun yang dilakukannya merupakan bagian dari bentuk ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan ini disampaikan oleh Tuan S:

“Saya ni yakin beneh kalo apa-apa yang saya *polah ni* bagian ibadah saya dengan Allah. Karna akan *etam* pertanggungjawabkan di *akherat* (Saya ini yakin sekali kalau apa-apa yang saya buat ini sebagian ibadah saya dengan Allah. Karena akan kami pertanggungjawabkan di akhirat)”

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa Tuan S melakukan pekerjaannya adalah bagian dari ibadah Tuan S yang merupakan pertanggungjawabannya ke akhirat kelak.

Tuan S mendefinisikan pekerjaannya sebagai akuntan adalah bagian dari ibadah. Yaitu pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Fitria, Ahmad-Zamri, & Zainol (2015) dan Burks (2015) menekankan bahwa akuntabilitas terhadap masyarakat merupakan ibadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah*.

Dalam penelitian ini juga ditemukan nilai keikhlasan dan makna ketakutan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Nyonya H yang menyatakan perlunya nilai keikhlasan yang diikuti oleh perasaan takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

“Kerja di sini harus penuh dengan rasa ikhlas. Bila *ndik* ada nilai ikhlas maka *ndik* ada gunanya kita bekerja di organisasi yang melayani masyarakat. Karena semua pekerjaan *etam* ini disaksikan oleh Allah SWT. Takutlah dengan Tuhan *etam ni*. Karena *endik* ada yang pernah luput bila kita berbuat kejahatan sedikit pun (Kerja di sini harus penuh dengan rasa ikhlas. Bila tidak ada nilai ikhlas maka tidak ada gunanya kita bekerja di organisasi melayani masyarakat. Karena semua pekerjaan kami ini disaksikan oleh Allah SWT. Takutlah dengan Tuhan kami ini. Karena tidak ada yang luput bila kita berbuat kejahatan sekalipun)”

Berdasarkan pernyataan di atas maka bisa ditarik kesimpulan akuntabilitas religi berasal dari nilai ikhlas yang berasal dari tiap individu yang berada di dalam organisasi. Selain nilai ikhlas, ada perasaan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Individu yang merasa takut kepada Tuhannya akan terciptanya akuntabilitas sebagai *khalifah*.

SIMPULAN

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat krusial bagi setiap organisasi. Akuntabilitas “keroan” merupakan akuntabilitas yang akan menjadi nafas penelitian ini yaitu akuntabilitas yang bersifat kemasyarakatan yaitu tolong menolong untuk kemajuan masyarakat. Akuntabilitas ini dapat diartikan kegiatan atau jiwa yang tertanam dalam akuntan-akuntan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Akuntabilitas “Keroan”

juga melambangkan akuntabilitas informal dalam hal penyampaian kepada masyarakat melalui hubungan mereka dengan karyawan atau dengan organisasi itu sendiri. Hubungan-hubungan itu digunakan untuk mencapai mekanisme akuntabilitas.

Kurangnya pemahaman dalam pembuatan laporan keuangan pada organisasi-organisasi yang diteliti. Menunjukkan perlu pelatihan, *workshop*, atau seminar tentang pembuatan laporan keuangan yang berbasiskan PSAK 45. Timbulnya peraturan sendiri pada LSM dimaksudkan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan. Dalam hal ini LSM hanya membuat laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya adanya partisipasi masyarakat pada LSM adalah untuk memperlancar akuntabilitas di dalam organisasi. Dalam hal ini partisipasi yang terjadi merupakan peranan masyarakat dalam kegiatan organisasi agar masyarakat menyaksikan mekanisme akuntabilitas yang ada di dalam organisasi. Adanya komunikasi informal antara pegawai dan pimpinan dalam mekanisme akuntabilitas menunjukkan bahwa percakapan sederhana bisa merupakan mekanisme akuntabilitas dalam organisasi. Menariknya penelitian ini juga menemukan adanya audit sosial. Yaitu pada LSM X yang merupakan organisasi keagamaan yang mendapatkan audit sosial keseluruhan yaitu pihak internal, pihak eksternal, dan pihak masyarakat. Pada LSM Z audit sosial hanya sebagian saja dan tidak menyeluruh yaitu audit internal dan dari masyarakat, sedangkan rumah sakit tidak memiliki audit sosial.

Timbulnya akuntabilitas religi yang menitikberatkan bahwa setiap kegiatan adalah pertanggungjawaban manusia sebagai *khali-fah* di dunia, sehingga apa yang dikerjakan saat ini merupakan suatu serangkaian ibadah kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Artinya, pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh seorang akuntan yang ditujukan untuk masyarakat adalah tanggung jawab mereka kepada Allah SWT. Adanya perasaan yang ikhlas dari tiap individu akan merefleksikan akuntabilitas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian ini memiliki beberapa limitasi atau batasan yaitu objek terlalu luas dan waktu yang sempit sehingga diperlukan penelitian selanjutnya yang mendalam tiap objek. Paradigma ketuhanan dapat digunakan untuk memperkaya penelitian selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahiabor, G., & Mensah, C.C.Y. (2013). Effectiveness of Internal Control on the Finance of Churches in Greater Accra, Ghana. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(13), 115-121.
- Andrews, A. (2014). Downward Accountability in Unequal Alliances: Explaining NGO Responses to Zapatista Demands. *World Development*, 54, 99-113. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.07.009>
- Arrington, C.E. (2007). A Prolegomenon to the Relation between Accounting, Language and Ethics. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 1(2), 1-12.
- Aziz, N.M.A. (2015). Does Social "Closeness" is Essential in the Medical Relief NGO? *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 172, 487-494. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.388>
- Bergner, J.M., Peffer, S.A., & Ramsay, R.J. (2016). Concession, Contention, and Accountability in Auditor-Client Negotiations. *Behavioral Research in Accounting*, 28(1), 15-25. <https://doi.org/10.2308/bria-51146>
- Brown, J., Dillard, J., & Hopper, T. (2015). Accounting, Accountants and Accountability Regimes in Pluralistic Societies: Taking Multiple Perspectives Seriously. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(5), 626-650. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2015-1996>
- Burks, J.J. (2015). Accounting Errors in Nonprofit Organizations. *Accounting Horizons*, 29(2), 341-361. <https://doi.org/10.2308/acch-51017>
- Chesterman, S. (2008). Globalization Rules: Accountability, Power, and the Prospects for Global Administrative Law. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 14(1), 39-52.
- Contrafatto, M., & Burns, J. (2013). Social and Environmental Accounting, Organisational Change and Management Accounting: A Processual View. *Management Accounting Research*, 24(4), 349-365. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2013.10.004>
- Conway, S.L., O'Keefe, P.A., & Hrascky, S.L. (2015). Legitimacy, Accountability and Impression Management in NGOs: The Indian Ocean Tsunami. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, 28(7),

- 1075-1098. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2012-01007>
- Crack, A.M. (2013). Language, Listening and Learning: Critically Reflective Accountability for INGO's. *International Review of Administrative Science*, 79(4), 809-828. <https://doi.org/10.1177/0020852313500599>
- Darmada, D.K., Atmadja, A.T., & Sinarwati, N.K. (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 51-60. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004>
- Darmayasa, I.N., & Aneswari, Y.R. (2015). Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350-361. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Davison, J., & Warren, S. (2009). Imag[in]ing Accounting and Accountability. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22(6), 845-857. <https://doi.org/10.1108/09513570910980436>
- Deegan, C., & Islam, M.A. (2014). An Exploration of NGO and Media Efforts to Influence Workplace Practices and Associated Accountability within Global Supply Chains. *The British Accounting Review*, 46(4), 397-415. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.10.002>
- Djamhuri, A., & Amirya, M. (2015). Indonesian Hospitals under the "BPJS" Scheme: A War in a Narrower Battlefield. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 341-349. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6027>
- Ebrahim, A. (2003). Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs. *World Development*, 31(5), 813-829. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7)
- Efferin, S. (2015). Akuntansi, Spritualitas dan Kearifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 466-480. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037>
- Feng, N.C. (2014). Economic Consequences of Going Concern Audit Opinions in Nonprofit Charitable Organizations. *Journal of Governmental & Nonprofit Accounting*, 3(1), 20-34. <https://doi.org/10.2308/ogna-50676>
- Fitria, Y., Ahmad-Zamri, O., & Zainol, Z. (2015). Accountability of Fund Management in Mosques, Kalimantan Timur. In *3rd AICIF- The Role of Zakah and Islamic Financial Institution into Poverty Alleviation and Economics Security*. Semarang.
- Gaver, J.J., & Im, S.M. (2014). Funding Sources and Excess CEO Compensation in Not-for-Profit Organizations. *Accounting Horizons*, 28(1), 1-16. <https://doi.org/10.2308/acch-50588>
- Goretzki, L., Strauss, E., & Weber, J. (2013). An Institutional Perspective on the Changes in Management Accountants' Professional Role. *Management Accounting Research*, 24(1), 41-63. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2012.11.002>
- Hasmath, R., & Hsu, J. (2008). NGOs in China: Issues of Good Governance and Accountability. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 30(1), 29-39. <https://doi.org/10.1080/23276665.2008.10779341>
- Harris, E., Petrovits, C.M., & Yetman, M.H. (2015). The Effect of Nonprofit Governance on Donations: Evidence from the Revised Form 990. *The Accounting Review*, 90(2), 579-610. <https://doi.org/10.2308/accr-50874>
- Hermanson, D.R., Smith, J.L., & Stephens, N.M. (2012). How Effective are Organizations' Internal Controls? Insights into Specific Internal Control Elements. *Current Issues in Auditing*, 6(1), 31-50. <https://doi.org/10.2308/ciia-50146>
- Jayasinghe, K., & Soobaroyen, T. (2009). Religious "Spirit" and Peoples' Perceptions of Accountability in Hindu and Buddhist religious Organizations. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, 22 (7), 997-1028. <https://doi.org/10.1108/09513570910987358>
- Jha, A., & Chen, Y. (2015). Audit Fees and Social Capital. *The Accounting Review*, 90(2), 611-639. <https://doi.org/10.2308/accr-50878>
- Kaya, D., Kirsch, R.J., & Henselmann, K. (2016). The Role of Non-governmental Organizations (NGOS) as Intermediaries of the European Union Decision to Adopt International Accounting Standards: 1973-2002. *Accounting Historians Journal*, 43(2), 59-127. <https://doi.org/10.2308/0148-4184.43.2.59>
- Khan, T. (2014). Kalimantan's Biodiversity: Developing Accounting Models to Prevent Its Economic Destruction. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(1), 150-182. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2013-1392>

- Khan, H.T.A., & Rahman, T. (2016). Women's Participations in Economic and NGO Activities in Bangladesh: An Empirical Study on the Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS). *International Journal of Sociology and Social Policy*, 36(7), 491-515. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-09-2015-0097>
- Kusdewanti, A.I.K. (2015). Memaknai Manajemen Bisnis Islami sebagai Kehidupan yang Menghidupi. *Imanesi*, 2(1), 32-50.
- Lauwo, S.G., Otusanya, O.J., & Bakre, O. (2016). Corporate Social Responsibility Reporting in the Mining Sector of Tanzania: (Lack of) Government Regulatory Controls and NGO Activism. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(6), 1038-1074. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2013-1380>
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed). London: Sage.
- Murjani, M. (2015). Interaksi Agama dan Politik Hukum Kesultanan Kutai Kartanegara: Studi Keagamaan Etnis Dayak-Kutai. *Mazahib*, 10(1), 15-26.
- Musmini, L.S., & Sirajudin. (2016). Makna Akuntansi Sosial dan Sustainability Sekaa Suka Duka. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 156-170. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7014>
- Neuman, W.L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed). London: Pearson Education.
- Niswatin, & Mahdalena. (2016). Nilai Kearifan Lokal "Subak" sebagai Modal Sosial Transmigran Etnis Bali. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 171-188. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7015>
- Nooteboom, G. (2015). Living Dangerously: Oplosan, Gambling, and Competition as Everyday Risk Taking in Java and East Kalimantan Indonesia. *Disaster Prevention and Management*, 24(4), 523-538. <https://doi.org/10.1108/DPM-04-2014-0067>
- Nunnenkamp, P., Ohler, H., & Schwörer, T. (2013). US based NGOs in International Development: Financial and Economic Determinants of Survival. *World Development*, 46, 45-65. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.024>
- Nyamori, R.C. (2009). Making Development Accountable: A Critical Analysis of the Systems of Accounting and Accountability for the Constituency Development Fund in Kenya. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 5(2), 197-227. <https://doi.org/10.1108/18325910910963436>
- O'Brien, E., & Tooley, S. (2013). Accounting for Volunteer Services: A Deficiency in Accountability. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 10(3), 279-294. <https://doi.org/10.1108/QRAM-09-2012-0037>
- O'Dwyer, B., & Boomsma, R. (2015). The Construction of NGO Accountability: Aligning Imposed and Felt Accountability in NGO-funder Accountability Relationships. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(1), 36-68. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2013-1488>
- Paranoan, S. (2015). Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 214-223. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6017>
- Parker, L.D., & Northcott, D. (2016). Qualitative Generalising in Accounting Research: Concepts and Strategies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(6), 1100-1131. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2026>
- Petrovits, C., Shakespeare, C., & Shih, A. (2011). The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Non-profit Organizations. *The Accounting Review*, 86(1), 325-357. <https://doi.org/10.2308/accr.00000012>
- Randa, F., Triyuwono, I., Ludigdo, U., & Sukoharsono, E.G. (2011). Studi Etnografi Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi Budaya Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 35-51.
- Rudiantoro, R., & Siregar, S.V. (2012). Kualitas laporan keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1-21.
- Roussy, M. (2015). Welcome to the Day-to-Day of Internal Auditors: How Do They Cope with Conflicts? *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 34(2), 237-264. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50904>
- Salle, I.Z. (2015). Akuntabilitas Manungtung: Memaknai Nilai Kalambusang

- pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 28-37. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6004>
- Samkin, G., & Schneider, A. (2010). Accountability, Narrative Reporting and Legitimation: The Case of a New Zealand Public Benefit Entity. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 23(2), 256-289. <https://doi.org/10.1108/09513571011023219>
- Schwenger, D., Straub, T., & Borzillo, S. (2014). Non Governmental Organizations: Strategic Management for a Competitive World. *Journal of Business Strategy*, 35(4), 11-19. <https://doi.org/10.1108/JBS-11-2013-0105>
- Scott, S.V., & Orlikowski, W.J. (2012). Reconfiguring Relations of Accountability: Materialization of Social Media in the Travel Sector. *Accounting, Organizations and Society*, 37(1), 26-40. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2011.11.005>
- Siraj, S.A., Ibrahim, S.H.M., & Sulaiman, M. (2007). The Financial Management Practices of State Mosques in Peninsular Malaysia. *Indonesian Management & Accounting Research*, 6 (2), 65-86
- Sitorus, J.H.E. (2016). Pancasila-based Social Responsibility Accounting. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 219, 700-709. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.054>
- Soobaroyen, T., & Mahadeo, J.D. (2012). Do Corporate Governance Codes Improve Board Accountability?: Evidence from an Emerging Economy. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 9(4), 337-362. <https://doi.org/10.1108/11766091211282661>
- Williams, S.J., & Adams, C.A. (2013). Moral Accounting? Employee Disclosures from a Stakeholder Accountability Perspective. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(3), 449-495. <https://doi.org/10.1108/09513571311311892>
- Williams, B. (2015). The Local Government Accountants' Perspective on Sustainability. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(2), 267-287. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-07-2014-0043>
- Yulandhika, T., & Nugrahanti, I.M. (2014). Mitigation and Adaptation Planning of Climate Change in East Kalimantan: A Critical Review. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 135, 64-69. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.326>